

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali hingga revisi terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adanya penerapan otonomi daerah, Pemerintah memberikan kebebasan kepada masing-masing daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan termasuk adanya pemerataan dana pembangunan dengan tujuan menjaga kelangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentunya dapat mencerminkan tingkat pertumbuhan manusia. Kesejahteraan ini menjadi salah satu dambaan setiap manusia, karena adanya kebutuhan tiga indikator mendasar seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tentunya dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan menentukan kebijakan ekonomi dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan pada tahun 2019 meningkat 0,63% dari 69,39% (2018) sehingga menjadi 70,02% (2019) dengan status dari sedang menjadi berstatus tinggi (BPS, 2019). Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan cukup bervariasi, terdapat 3 (tiga) kota yang mencapai kategori tinggi dan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dalam kategori sedang. Berikut data IPM sekabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019.

Tabel 1.1
Data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	IPM (%)					Kategori
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kab. Banyuasin	64,15	65,01	65,85	66,40	66,90	Sedang
2	Kab. Empat Lawang	63,55	64,00	64,21	64,81	65,10	Sedang
3	Kab. Lahat	64,73	65,75	66,38	66,99	67,62	Sedang
4	Kab. Muara Enim	65,02	66,71	67,63	68,28	68,88	Sedang
5	Kab. Musi Banyuasin	65,76	66,45	66,96	67,57	67,83	Sedang
6	Kab. Musi Rawas	64,11	64,75	65,31	66,18	66,92	Sedang
7	Kab. Musi Rawas Utara	62,32	63,05	63,18	63,75	64,32	Sedang
8	Kab. Ogan Ilir	65,35	65,45	65,63	66,43	67,22	Sedang
9	Kab. OKI	64,73	65,44	66,11	66,57	66,96	Sedang
10	Kab. OKU	67,18	67,47	68,28	69,01	69,45	Sedang
11	Kab. OKUS	62,57	63,05	63,96	64,84	65,43	Sedang
12	Kab. OKUT	67,17	67,38	67,84	68,58	69,34	Sedang
13	Kab. PALI	60,83	61,66	62,58	63,49	64,33	Sedang
14	Kota Lubuk Linggau	73,17	73,57	75,67	74,09	74,81	Tinggi
15	Kota Pagar Alam	65,37	65,96	66,81	67,62	68,44	Sedang
16	Kota Palembang	76,02	76,59	77,22	77,89	78,44	Tinggi
17	Kota Prabumulih	73,17	73,38	73,58	74,04	74,40	Tinggi

Sumber : BPS Sumsel 2015-2019 (Data Diolah,2021)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan kategori status tinggi, sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya kategori status sedang. Hal ini menandakan bahwa 82,35% pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum terlaksana secara merata khususnya pada wilayah dengan status IPM sedang dan 17,65% telah terlaksana dengan optimal dengan status IPM tinggi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Akibatnya timbul daerah-

daerah yang tertinggal dan belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, dalam peningkatan IPM pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tata kelola daerah dengan baik.

Sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh atau dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga juga meningkatkan kualitas pelayanan publik (Fadhly,2020). Berdasarkan penelitian (Afif dkk, 2018) dan (Hobrouw dkk, 2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Juliana dkk, 2020), bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah dengan mengalokasikan dana untuk keperluan daerahnya khususnya dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Besarnya transfer dari pusat kepada tiap daerah tentunya bervariasi. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk mengecilkan kesenjangan kesanggupan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian (Afif dkk,2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Bagi Hasil dapat menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Juliana dkk,

2020), bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian (Savitri, 2017) dan (Juliana dkk, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum dapat menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Afif,2018) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian (Afif dkk,2018) dan (Juliana dkk, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus dapat menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Savitri, 2017), bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Selain penerimaan daerah adapula pengeluaran daerah yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia salah satunya yaitu Belanja Modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana terkait dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan tentunya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan

Keuangan (LHP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 126,64% dari Rp607.740.926.745,28 (2016) menjadi Rp1.377.382.678.423,59 (2017). Peningkatan secara signifikan pada tahun 2017 dikarenakan adanya peningkatan realisasi anggaran terkait belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal BLUD (LHP BPK Sumsel, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengeluarkan dana yang sangat besar dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penelitian (Hanantoko, 2018) dan Ariyati (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal dapat menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Hanantoko (2020) dengan objek penelitian di Jawa Timur tahun 2014-2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Objek penelitiannya adalah 17 kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber pendapatan daerah pada belanja daerah untuk meningkatkan prasarana dan sarana publik meliputi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang nantinya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini juga akan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga pertumbuhan antara kabupaten dan kota bisa berkembang bersama-sama dalam hal prasarana dan sarana publik.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan alasan adanya: *Pertama*, fenomena terkait pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang agak lambat dibanding dengan Kota Palembang,

Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau. *Kedua*, adanya hasil yang tidak konsisten dari faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada penelitian sebelumnya. *Ketiga*, replikasi dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian menjadi lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan mengangkat mengenai Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal di 17 Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2015 – 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan

Manusia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1. 4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Keuangan Sektor Publik khususnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dalam mengalokasikan sumber pendapatan daerah pada belanja daerah untuk dana pembangunan ekonomi.